



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Lampung Timur, diperlukan partisipasi masyarakat karena terdapat pembiayaan yang tidak tertampang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019;
8. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2019);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se-Kabupaten Lampung Timur
7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan

satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebebaninya.

8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat desa yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu lancarnya proses PTSL.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### OBYEK PTSL

#### Pasal 2

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada alas hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset pemerintah/pemerintah daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek *landreform*, dan bidang tanah lainnya.
- (3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

**BAB III**  
**PERCEPATAN PELAKSANAAN PTS'L DI TINGKAT DESA**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan PTS'L di tingkat desa, kepala desa membentuk Panitia Pelaksana PTS'L ditingkat desa.
- (2) Panitia Pelaksana PTS'L ditingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelindung : Kepala Desa
  - b. Ketua : Dari unsur masyarakat pemohon PTS'L.
  - c. Sekretaris : Dari unsur Perangkat Desa pemohon PTS'L.
  - d. Bendahara : Dari unsur masyarakat pemohon PTS'L.
  - e. Anggota : Dari unsur Perangkat Desa/unsur masyarakat pemohon PTS'L sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari Sekretaris Desa dan/atau Kepala Dusun.
- (4) Panitia Pelaksana PTS'L ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyelesaikan berkas administrasi persyaratan PTS'L;
  - b. melaksanakan pengelolaan keuangan biaya yang dibebankan kepada masyarakat penerima manfaat PTS'L;
  - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan PTS'L.
- (5) Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Kegiatan PTS'L sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

- (1) Pembiayaan PTS'L dibebankan pada APBN, kecuali untuk pembiayaan persiapan.
- (2) Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau masyarakat pemohon PTS'L.

**Pasal 5**

Pembiayaan PTS'L pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk :

- a. penyuluhan;
- b. pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
- c. pengukuran bidang tanah;

- d. pemeriksaan tanah;
- e. penerbitan keputusan pemberian hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
- f. penerbitan sertifikat Hak atas Tanah; dan
- g. supervisi dan pelaporan.

#### Pasal 6

Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :

- a. kegiatan penghimpunan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas desa.

#### Pasal 7

Pembiayaan kegiatan penghimpunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pembiayaan penghimpunan dokumen berupa :

- a. Surat permohonan pendaftaran tanah pertama kali;
- b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- c. Surat keterangan tanah bekas milik adat;
- d. Pernyataan atas batas tanah dan luas tanah;
- e. Kutipan daftar buku C;
- f. Berita acara kesaksian.

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai Rp. 6.000,- paling sedikit 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (2) Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa berpedoman pada ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
  - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
  - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok, dan
  - c. transportasi dari desa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besarnya biaya transportasi dihitung secara at cost.

## Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) setiap pemohon yang bersumber dari APBD;
- (2) Apabila sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggarkan dalam APBD maka sumber biaya dibebankan kepada masyarakat pemohon PTSL;
- (3) Apabila biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, besaran biaya dapat ditambah sesuai dengan rencana kebutuhan biaya dan hasil kesepakatan musyawarah masyarakat pemohon PTSL dengan biaya tambahan paling tinggi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pendapatan asli desa lain;
- (5) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain dipergunakan untuk :
  - a. belanja alat tulis kantor (ATK)
  - b. makan dan minum rapat pelaksanaan program PTSL
  - c. transportasi dari desa ke lokasi obyek PTSL dan sebaliknya, yang besarnya tidak melebihi ketentuan standar harga satuan barang dan jasa yang berlaku;
  - d. honorarium Panitia Pelaksana PTSL.

## Pasal 11

- (1) Mekanisme penentuan besaran biaya yang dapat ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa, Pokmas melakukan musyawarah dengan calon peserta PTSL.
  - b. Menentukan perkiraan jumlah kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan kelompok masyarakat, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Menyepakati jumlah biaya tambahan yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL.
- (2) Proses musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah, dan selanjutnya dituangkan dalam peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5);
- (3) Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana PTSL, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Contoh Format Berita Acara Musyawarah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku Administrasi Pencatatan Keuangan, Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendaftaran Sistematis Lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KERINGANAN PAJAK

### Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran Tanah Sistematik dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI SOSIALISASI

### Pasal 14

Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa, melakukan sosialisasi Pelaksanaan PTSL, termasuk pembiayaan persiapan yang harus ditanggung oleh masyarakat karena tidak dianggarkan dalam APBN dan APBD.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

- (1) Biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan oleh masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dipertanggungjawbkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Nomor 31 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 04 September 2020

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**  
**ttd**

**ZAIFUL BOKHARI**

Diundangkan di Lampung Timur  
Pada tanggal 04 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**SYAHRUDIN PUTERA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 51**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

BERITA ACARA MUSYAWARAH

DESA :  
KECAMATAN :

Pada hari ini ....., tanggal....., tahun....., telah dilakukan musyawarah Calon Pemohon PTSL.....untuk membicarakan ..... dengan hasil sebagai berikut :

- a. .....
- b. .....
- c. .....
- d. ....dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS PANITIA,

KETUA PANITIA,

.....

.....

Lampiran :  
Daftar Hadir Anggota Pokmas Calon Peserta PTSL

**B. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)  
POKMAS ..... DESA ..... KECAMATAN.....

NO	RENCANA BELANJA BARANG/JASA	JUMLAH	RENCANA BIAYA (Rp.)
1.	Makan dan minum rapat		
2.	Pengadaan patok batas tanah		
3.	Belanja materai		
4.	Belanja ATK		
5.	Transportasi ke Kantor Pertanahan kabupaten		
6.	Transportasi ke Lokasi		
7.	Honor panitia		
8.			
9.			
10.			

SEKRETARIS PANITIA,

KETUA PANITIA,

.....

.....

### C. CONTOH FORMAT BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN/ BELANJA (Rp.)
1.	01-03-2020	Dari Pak Budi	200.000.	
2.	Dst	Fotokopi		50.000
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

....., .....

Bendahara Panitia,

Sekretaris Panitia,

Ketua Panitia,

.....

.....

.....

**D. CONTOH PERATURAN DESA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

KEPALA DESA XXX  
KECAMATAN XXXXXXXX  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DESA XXX  
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA XXX,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor..... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nornor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019)
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor..... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Lampung Timur;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA XXX

dan  
KEPALA DESA XXX

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA XXX TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa.
4. Panitia Pelaksana PTSL adalah Panitia ditingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah masyarakat penerima manfaat PTSL.

**BAB II**  
**KEGIATAN PTSL**

**Pasal 2**

- (1) PTSL bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
- (2) Kegiatan PTSL dilaksanakan secara kolektif dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

**Pasal 3**

Kegiatan PTSL yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi :

- a. Penyuluhan;
- b. Pengumpulan Data (alat bukti / alas hak);
- c. Pengukuran bidang tanah;
- d. Pemeriksaan tanah;
- e. Penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
- f. Penerbitan Serifikat; dan
- g. Supervisi dan pelaporan.

**Pasal 4**

Tugas Pemerintah Desa dalam PTSL :

- a. membentuk Panitia Pelaksana PTSL;
- b. memfasilitasi Panitia Pelaksana Kegiatan PTSL dalam rangka musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan PTSL;
- c. memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan PTSL dalam rangka tertib administrasi dan transparansi pengelolaan pembiayaan kegiatan PTSL;
- d. menerima berkas permohonan PTSL, dari Panitia Pelaksana PTSL untuk diteruskan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

## Pasal 5

Masyarakat penerima manfaat PTSL berkewajiban:

- a. menyediakan/menyiapkan Alas hak/alat bukti perolehan/ penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa).
- c. menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.
- d. pembuatan/ penyediaan patok tanda batas tanah;
- e. menyediakan materai
- f. menyediakan lain-lain biaya (transportasi, biaya angkut dan pemasangan patok, Foto Copy, ATK dll).

## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PTSL

### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan PTSL Pemerintah Desa membentuk Panitia Pelaksana PTSL yang unsurnya terdiri dari masyarakat penerima PTSL.
- (2) Susunan Panitia Pelaksana PTSL terdiri dari :
  - a. Pelindung;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Anggota.
- (3) Pengisian Panitia Pelaksana PTSL didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat penerima PTSL dengan difasilitasi Pemerintah Desa.
- (4) Panitia Pelaksana PTSL mempunyai tugas:
  - a. menghimpun berkas permohonan PTSL;
  - b. melaksana musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan PTSL;
  - c. mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat penerima Kegiatan PTSL dalam rangka pembiayaan kegiatan PTSL;
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan PTSL Kepada Kepala Desa.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan PTSL yang menjadi kewajiban penerima manfaat PTSL dibebankan pada masyarakat penerima manfaat
- (2) Besarnya biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), sebesar Rp. ....,- (.....), yang terdiri dari:
  - a. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - b. biaya tambahan sebesar Rp..... (sesuai kesepakatan)
- (3) Biaya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk:
  - a. kegiatan penghimpunan dokumen;
  - b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
  - c. kegiatan operasional petugas desa.
- (4) Biaya tambahan sebesar Rp..... sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk:
  - a. belanja alat tulis kantor (ATK);
  - b. makan dan minum rapat pelaksanaan program PTSL;

- c. transportasi dari desa ke lokasi obyek PTSL dan sebaliknya, yang besarannya tidak melebihi ketetuan standar harga satuan barang dan jasa yang berlaku; dan
- d. honorarium panitia Panitia Pelaksana PTSL.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa XXX

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA XXX

Diundangkan di .....  
Pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA XXX

.....

LEMBARAN DESA XXX KECAMATAN XXXX KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN  
20... NOMOR.....

**E. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama Desa)

NOMOR : / TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DESA (nama Desa)

KEPALA DESA (nama Desa),

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;  
b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa XXX Nomor XX Tahun 20... tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan bahwa Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Prona Pemerintah Desa membentuk Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang unsurnya terdiri dari masyarakat penerima Prona;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa XXX;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019);
6. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor..... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Lampung Timur;
7. Peraturan Desa ..... Nomor .....Tahun..... tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa XXX dengan susunan keanggotaan sebagairnana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimakauad dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun berkas permohonan Pendaftaram Tanah Sistematis Lengkap;
  - b. melaksanakan musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - c. mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat penerima Kegiatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap dalam rangka pembiayaan kegiatan Prona;
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sisternatis Lengkap Kepada Kepala Desa XXX.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagairnana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa XXX melalui Sekretaris Desa XXX.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanriya Keputusan ini, dibebankan pada masyarakat penerima ma.nfaat Pendaftarain Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan hasil musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan Prona.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .........  
pada tariggal .....

**KEPALA DESA XXX**

**NAMA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA XXX  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DESA XXX

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DESA XXX

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Kepala Desa XXX
2.	Ketua	Dari Unsur Masyarakat Pemohon Manfaat Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap
3.	Sekretaris	Dari Unsur Perangkat Desa/ Masyarakat Pemohon Manfaat Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap
4.	Bendahara	Dari Unsur Masyarakat Pemohon Manfaat Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap
5.	Anggota	Dari Unsur Perangkat Desa/ Masyarakat Pemohon Manfaat Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap
6.	Anggota	Dari Unsur Masyarakat Pemohon Manfaat Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap
7.	Anggota	Dari Unsur Masyarakat Pemohon Manfaat Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap

KEPALA DESA XXX

.....